JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELOMPOK WANITA TANI (KWT) DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DI KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG

Rd. Putri Nur Widianingsih[1], Agustina Setiawan[2], Rira Nuradhawati[3]

[1,2,3.] Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui Program Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan pertanian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang berdasarkan lima dimensi pemberdayaan menurut UNICEF, yaitu kesejahteraan (*welfare*), akses (*access)*, kesadaran kritis (*critical awareness*), partisipasi (*participation*), dan kontrol (*control*).

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berasal dari UPTD Pertanian, penyuluh pertanian lapangan, pengurus Kelompok Wanita Tani, anggota kelompok, serta pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kelompok Wanita Tani telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan keterampilan anggota, serta bertambahnya pendapatan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan hasil pertanian. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan belum berlangsung secara optimal akibat ketimpangan distribusi bantuan, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, rendahnya keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan, serta tingginya ketergantungan kelompok terhadap bantuan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih berorientasi pada penguatan kapasitas teknis dan belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian kelembagaan maupun ekonomi kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan, pemerataan akses sumber daya, pengembangan jejaring pemasaran, serta peningkatan kapasitas kewirausahaan agar keberlanjutan Program Kelompok Wanita Tani dapat tercapai secara lebih efektif.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Kata Kunci : pemberdayaan masyarakat, kelompok wanita tani, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, pembangunan pertanian.

Abstract

Community empowerment constitutes a strategic development approach aimed at strengthening the capacity of individuals and communities to manage available resources independently and sustainably. One of its practical implementations is the Women's Farmer Group (Kelompok Wanita Tani/KWT) Program, designed to improve household food security, strengthen women's participation in agricultural development, and enhance rural economic welfare. This study analyzes community empowerment through the Women's Farmer Group Program in Situraja District, Sumedang Regency, using UNICEF's empowerment framework consisting of welfare, access, critical awareness, participation, and control.

A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving agricultural extension officers, government officials, KWT leaders, and group members. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the Women's Farmer Group Program has significantly contributed to improving household food security, strengthening members' agricultural skills, and increasing family income through home-garden utilization and agricultural product processing. Nevertheless, the empowerment process has not yet reached its optimal level due to unequal distribution of government assistance, limited access to productive resources, insufficient member participation in decision-making processes, and continued dependence on external support. These findings suggest that the program has successfully enhanced technical capacity but has not yet fully established institutional and economic independence among farmer groups. Strengthening institutional governance, ensuring equitable resource distribution, expanding market access, and improving entrepreneurial capacity are therefore essential for achieving sustainable community empowerment.

Keywords : community empowerment, women farmer groups, food security, women's empowerment, agricultural development.

PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penguatan kapasitas sosial, ekonomi, maupun kelembagaan masyarakat. Pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan *top-down* menuju *people-centered development* menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengelola sumber daya, serta menentukan arah pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal. Dalam perspektif tersebut, pemberdayaan masyarakat tidak lagi dipahami sebagai pemberian bantuan semata, melainkan sebagai proses peningkatan kapasitas agar

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

masyarakat mampu mengambil keputusan secara mandiri dan berkelanjutan (Chambers, 1997; Mardikanto & Soebiato, 2019).

Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis mengingat sebagian besar masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti rendahnya produktivitas pertanian, terbatasnya akses terhadap modal, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya nilai tambah hasil pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan berkembang relatif lebih lambat dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pertanian (FAO, 2023).

Perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian karena berperan sebagai pengelola rumah tangga, penghasil pangan keluarga, sekaligus pelaku ekonomi produktif. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia menjelaskan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya pertanian mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan (FAO, 2023). Demikian pula UN *Women* (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development Goals terutama tujuan pertama, kedua, kelima, dan kedelapan.

Sebagai implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian, Pemerintah Indonesia mengembangkan Program Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berlandaskan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani. Program ini dirancang sebagai media pembelajaran, kerja sama, serta pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan, pengolahan hasil pertanian, diversifikasi pangan, serta pengembangan kewirausahaan perempuan.

Di Kabupaten Sumedang, khususnya Kecamatan Situraja, Program Kelompok Wanita Tani telah berkembang di berbagai desa dan memperoleh dukungan dari pemerintah daerah melalui

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

bantuan sarana produksi, program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), penyuluhan, serta pendampingan teknis. Kehadiran program tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan budidaya maupun pengolahan hasil pertanian. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan masih ditemukan berbagai persoalan yang menghambat efektivitas pemberdayaan.

Fenomena pertama menunjukkan masih terdapat ketimpangan distribusi bantuan pemerintah antar Kelompok Wanita Tani sehingga tidak seluruh kelompok memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya. Kedua, terdapat perbedaan kapasitas kelembagaan dan jumlah anggota yang berimplikasi terhadap kemampuan kelompok dalam mengelola program secara mandiri. Ketiga, sebagian besar kelompok masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga sehingga aktivitas usaha produktif dan hilirisasi hasil pertanian belum berkembang secara optimal. Keempat, keberlanjutan program masih sangat dipengaruhi oleh bantuan pemerintah sehingga tingkat kemandirian ekonomi kelompok relatif rendah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan belum sepenuhnya diikuti oleh terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sering kali masih terkendala oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemberdayaan UNICEF yang meliputi lima dimensi, yaitu kesejahteraan (*welfare*), akses (*access*), kesadaran kritis *(critical awareness*), partisipasi (*participation*), dan kontrol (*control*). Kelima dimensi tersebut dipilih karena mampu menjelaskan pemberdayaan masyarakat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga perubahan kapasitas sosial, kemampuan mengambil keputusan, serta penguatan posisi masyarakat dalam mengendalikan proses pembangunan.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang hanya menilai keberhasilan Program Kelompok Wanita Tani dari aspek peningkatan pendapatan atau produksi pertanian, penelitian ini menempatkan pemberdayaan sebagai proses transformasi sosial yang melibatkan perubahan kapasitas individu, kelembagaan, serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Dengan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat berbasis gender sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas Program Kelompok Wanita Tani sebagai instrumen pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif melalui interpretasi terhadap pengalaman, persepsi, dan interaksi para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberdayaan (Creswell & Poth, 2018).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses pemberdayaan masyarakat yang berlangsung pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Situraja. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu individu-individu yang dianggap memahami secara langsung implementasi Program Kelompok Wanita Tani. Informan terdiri atas pejabat UPTD Pertanian Kecamatan Situraja, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pengurus Kelompok Wanita Tani, anggota kelompok, serta aparat pemerintah desa yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampak pemberdayaan terhadap anggota kelompok. Observasi dilakukan terhadap aktivitas budidaya pertanian, pemanfaatan pekarangan, kegiatan pelatihan, serta mekanisme pengambilan keputusan di dalam kelompok. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui laporan kegiatan, dokumen kelembagaan, foto kegiatan, serta arsip dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Proses analisis

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Untuk menjamin validitas temuan, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking kepada beberapa informan utama. Selain itu, hasil observasi dibandingkan dengan hasil wawancara serta dokumen resmi pemerintah sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi (Lincoln & Guba, 1985).

Sebagai kerangka analisis, penelitian menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh UNICEF yang terdiri atas lima dimensi utama, yaitu Welfare, Access, Critical Awareness, Participation, dan Control. Kelima dimensi tersebut dipilih karena mampu menjelaskan keberhasilan pemberdayaan secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga perubahan kapasitas sosial, kesadaran kritis, partisipasi, serta kemampuan masyarakat dalam mengendalikan proses pembangunan.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Situraja

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang dikembangkan pemerintah sebagai media pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Di Kecamatan Situraja, program ini memperoleh dukungan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan teknis, bantuan sarana produksi pertanian, serta pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Implementasi program diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan rumah tangga, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola usaha produktif berbasis potensi lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar anggota KWT memanfaatkan lahan pekarangan untuk membudidayakan berbagai komoditas hortikultura, tanaman obat keluarga, serta tanaman pangan yang memiliki nilai konsumsi maupun nilai ekonomi. Aktivitas tersebut memberikan manfaat langsung terhadap pengurangan pengeluaran rumah tangga karena sebagian kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri. Selain itu, beberapa kelompok telah mengembangkan kegiatan pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah ekonomi.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Meskipun demikian, tingkat perkembangan antar kelompok menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kelompok yang memiliki kepemimpinan aktif, intensitas pendampingan tinggi, serta jaringan pemasaran yang baik menunjukkan perkembangan kelembagaan yang lebih pesat dibandingkan kelompok yang masih bergantung pada bantuan pemerintah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas kepemimpinan, serta tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan kelompok.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas Program Kelompok Wanita Tani dalam penelitian ini dilakukan menggunakan lima dimensi pemberdayaan menurut UNICEF, yaitu kesejahteraan (*welfare*), akses (*access*), kesadaran kritis (*critical awareness*), partisipasi (*participation*), dan kontrol (*control*). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan program, baik dari aspek ekonomi maupun transformasi sosial yang terjadi di dalam kelompok.

Dimensi *Welfare* (Kesejahteraan)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Kelompok Wanita Tani telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, terutama melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Hasil budidaya sayuran, cabai, tomat, terung, serta berbagai komoditas hortikultura lainnya mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi pangan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa program tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pertanian, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan rumah tangga.

Selain manfaat konsumtif, beberapa kelompok berhasil mengembangkan kegiatan ekonomi produktif melalui penjualan hasil panen maupun pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Aktivitas tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi anggota, meskipun kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh skala usaha yang masih kecil, keterbatasan akses pasar, serta rendahnya kapasitas kewirausahaan anggota kelompok.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Secara akademik, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan Program Kelompok Wanita Tani masih berada pada tahap economic strengthening, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi dasar, dan belum sepenuhnya berkembang menjadi economic empowerment yang ditandai dengan kemampuan menciptakan usaha mandiri, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing produk. Dengan demikian, dimensi kesejahteraan telah mengalami kemajuan, namun belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dimensi *Access* (Akses)

Akses merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemberdayaan karena menunjukkan sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Dalam perspektif pemberdayaan, akses tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memperoleh bantuan pemerintah, tetapi juga mencakup kesempatan memperoleh informasi, pendidikan, teknologi, modal usaha, jaringan pemasaran, serta pengambilan keputusan pembangunan (Kabeer, 1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Situraja telah memperoleh berbagai bentuk akses melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi pertanian, penyuluhan, serta pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) juga memberikan kesempatan bagi kelompok untuk meningkatkan kapasitas budidaya tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa distribusi akses tersebut belum berlangsung secara merata. Beberapa kelompok memperoleh intensitas pendampingan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan kapasitas kelembagaan menyebabkan kelompok yang telah berkembang lebih mudah memperoleh bantuan lanjutan, sementara kelompok yang masih lemah justru mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. Fenomena ini memperlihatkan adanya kecenderungan *path dependency*, yaitu bantuan pemerintah lebih banyak diberikan kepada kelompok yang telah mapan sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan antar kelompok.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi Sen (1999) mengenai *capability approach*, yang menyatakan bahwa pembangunan tidak cukup menyediakan sumber daya, tetapi harus memastikan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

setiap individu memiliki kemampuan yang setara dalam memanfaatkan peluang tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penyediaan bantuan pemerintah belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kapasitas kelembagaan sehingga manfaat program belum dirasakan secara proporsional oleh seluruh kelompok.

Analisis ini juga sejalan dengan penelitian Rahman et al. (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan program pemberdayaan pertanian lebih banyak ditentukan oleh kualitas akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar dibandingkan besarnya bantuan fisik yang diterima masyarakat. Dengan demikian, peningkatan akses pada Program Kelompok Wanita Tani perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi pemasaran, akses pembiayaan mikro, serta kemitraan dengan sektor swasta agar pemberdayaan menghasilkan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dimensi *Critical Awareness* (Kesadaran Kritis)

Kesadaran kritis merupakan inti dari proses pemberdayaan karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat memahami penyebab struktural dari berbagai persoalan yang dihadapi serta kemampuan menyusun solusi secara mandiri. Menurut Freire (1970), pemberdayaan tidak akan berhasil apabila masyarakat hanya menjadi penerima program tanpa memiliki kemampuan melakukan refleksi kritis terhadap kondisi sosial yang dialaminya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kelompok Wanita Tani telah meningkatkan pengetahuan anggota mengenai teknik budidaya tanaman, diversifikasi pangan, pengolahan hasil pertanian, serta pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan. Pelatihan dan penyuluhan yang diberikan pemerintah secara bertahap mampu mengubah pola pikir masyarakat mengenai fungsi pekarangan sebagai sumber pangan sekaligus sumber pendapatan keluarga.

Meskipun demikian, perubahan tersebut masih didominasi oleh peningkatan kemampuan teknis (*technical capacity*) dibandingkan perubahan kesadaran sosial (*critical consciousness*). Sebagian besar anggota masih memandang bantuan pemerintah sebagai faktor utama keberhasilan kelompok. Ketergantungan terhadap bantuan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum sepenuhnya menghasilkan transformasi pola pikir menuju kemandirian ekonomi.

Dari perspektif teori Freire, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih berada pada tahap adaptif, yaitu masyarakat mampu menerima inovasi yang diberikan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

pemerintah tetapi belum sepenuhnya memiliki kapasitas melakukan inovasi secara mandiri. Pemberdayaan yang ideal seharusnya menghasilkan masyarakat yang mampu mengidentifikasi kebutuhan, merancang solusi, serta mengembangkan inovasi sesuai potensi lokal tanpa bergantung pada intervensi pemerintah.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pemberdayaan. Keberhasilan Program Kelompok Wanita Tani tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan ataupun besarnya bantuan yang disalurkan, tetapi harus diukur melalui perubahan pola pikir, meningkatnya kreativitas usaha, serta kemampuan kelompok menciptakan inovasi secara mandiri. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan perlu diarahkan pada pembangunan kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan sosial, dan penguatan jejaring antar kelompok.

Dimensi *Participation* (Partisipasi)

Partisipasi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pemberdayaan masyarakat karena menunjukkan sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengembangan program. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa partisipasi yang sesungguhnya tidak hanya berupa kehadiran masyarakat dalam kegiatan, tetapi juga mencakup kemampuan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani relatif tinggi dalam kegiatan operasional seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, pelatihan, serta kerja bakti kelompok. Tingginya keterlibatan tersebut memperlihatkan adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program yang dijalankan.

Namun demikian, partisipasi dalam aspek pengambilan keputusan masih didominasi oleh ketua kelompok dan beberapa anggota inti. Sebagian besar anggota hanya mengikuti keputusan yang telah disepakati oleh pengurus tanpa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masih berada pada tingkat tokenism, yaitu masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan tetapi belum memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah kebijakan kelompok.

Secara akademik, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi administratif dan partisipasi substantif. Partisipasi administratif lebih menekankan kehadiran masyarakat sebagai pelaksana program, sedangkan partisipasi substantif menempatkan

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki otoritas dalam menentukan keputusan strategis. Pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan transformasi menuju partisipasi substantif agar kelembagaan kelompok mampu berkembang secara mandiri.

Dimensi *Control* (Kontrol)

Dimensi kontrol merupakan tingkat tertinggi dalam proses pemberdayaan karena menunjukkan kemampuan masyarakat mengendalikan sumber daya, menentukan arah pembangunan, serta mempertahankan keberlanjutan program secara mandiri. Menurut UNICEF, keberhasilan pemberdayaan baru dapat dikatakan optimal apabila masyarakat memiliki kontrol terhadap keputusan, pengelolaan sumber daya, serta manfaat pembangunan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrol Kelompok Wanita Tani terhadap pengelolaan program masih relatif terbatas. Sebagian besar kebijakan strategis masih dipengaruhi oleh arah program pemerintah, baik terkait jenis bantuan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, maupun prioritas program tahunan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat otonomi kelompok belum berkembang secara optimal.

Selain itu, aspek pemasaran hasil pertanian masih menjadi kelemahan utama. Sebagian besar kelompok belum memiliki jaringan pemasaran yang stabil sehingga hasil produksi hanya dipasarkan dalam skala lokal. Ketergantungan terhadap pasar tradisional menyebabkan nilai tambah ekonomi yang diperoleh anggota relatif rendah.

Dalam perspektif pemberdayaan, lemahnya kontrol terhadap sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan belum berlangsung secara penuh. Program telah berhasil meningkatkan kemampuan teknis masyarakat, namun belum sepenuhnya membangun *institutional empowerment*, yaitu kemampuan organisasi mengelola sumber daya, membangun kemitraan, mengembangkan usaha, serta mempertahankan keberlanjutan kelembagaan secara mandiri.

Oleh karena itu, penguatan dimensi kontrol perlu dilakukan melalui pengembangan koperasi kelompok, digitalisasi pemasaran, penguatan kemitraan dengan UMKM dan sektor swasta, serta pengembangan sistem kewirausahaan berbasis agribisnis sehingga Kelompok Wanita Tani tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Berdasarkan kelima dimensi UNICEF, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Situraja telah menghasilkan kemajuan pada aspek welfare dan participation, namun masih menghadapi tantangan pada dimensi access, critical awareness, dan terutama kontrol. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan masih didominasi oleh pendekatan *capacity building*, sementara transformasi menuju *community self-reliance* belum sepenuhnya tercapai.

Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan merupakan proses multidimensional yang tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan pendapatan atau produksi pertanian. Pemberdayaan yang berkelanjutan mensyaratkan peningkatan kapasitas individu, penguatan kelembagaan, pemerataan akses terhadap sumber daya, peningkatan kesadaran kritis, serta kemampuan masyarakat mengendalikan proses pembangunan secara mandiri. Dengan demikian, keberhasilan Program Kelompok Wanita Tani seharusnya diukur berdasarkan tingkat kemandirian sosial-ekonomi kelompok, bukan semata-mata berdasarkan jumlah bantuan pemerintah yang disalurkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan pertanian, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, meningkatkan keterampilan budidaya, serta menambah pendapatan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan hasil pertanian. Program juga telah mendorong tumbuhnya partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial-ekonomi desa sehingga memperkuat posisi perempuan sebagai aktor pembangunan lokal.

Berdasarkan analisis menggunakan lima dimensi pemberdayaan UNICEF, dapat disimpulkan bahwa dimensi *welfare* dan *participation* menunjukkan capaian yang relatif baik. Peningkatan kesejahteraan terlihat melalui berkurangnya pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dan munculnya sumber pendapatan tambahan dari hasil budidaya maupun pengolahan produk pertanian. Di sisi lain, keterlibatan anggota dalam berbagai aktivitas kelompok

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

menunjukkan bahwa Program KWT berhasil membangun modal sosial yang mendukung keberlanjutan kegiatan kelompok.

Namun demikian, dimensi *access, critical awareness*, dan terutama **kontrol** belum berkembang secara optimal. Pemerataan akses terhadap bantuan, pelatihan, dan informasi masih menjadi tantangan karena terdapat perbedaan kapasitas antar kelompok. Selain itu, proses pemberdayaan masih lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis dibandingkan transformasi kesadaran kritis dan kemandirian kelembagaan. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengembangkan usaha secara mandiri maupun membangun jaringan pemasaran yang berkelanjutan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan Program Kelompok Wanita Tani belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya pemberdayaan masyarakat secara utuh. Pemberdayaan tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan produksi atau pendapatan, tetapi harus dilihat sebagai proses transformasi sosial yang menghasilkan masyarakat yang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, serta kontrol terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan Program KWT perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas individu, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kemandirian ekonomi kelompok.

Secara keseluruhan, penelitian ini mempertegas bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kapasitas masyarakat, kualitas pendampingan, tata kelola kelembagaan, serta dukungan kebijakan pemerintah. Apabila aspek-aspek tersebut dapat diperkuat secara berkelanjutan, Program Kelompok Wanita Tani berpotensi menjadi model pemberdayaan perempuan berbasis pertanian yang mampu mendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan yang inklusif.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat dengan menunjukkan bahwa model pemberdayaan UNICEF yang meliputi *welfare, access, critical awareness, participation,* dan *control* masih relevan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kelima dimensi tersebut bersifat saling berkaitan dan membentuk suatu proses yang berkelanjutan.

https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Peningkatan kesejahteraan ekonomi belum dapat dikategorikan sebagai keberhasilan pemberdayaan apabila belum diikuti oleh meningkatnya akses terhadap sumber daya, berkembangnya kesadaran kritis, tingginya partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan kelompok mengendalikan sumber daya secara mandiri.

Selain itu, penelitian ini memperkuat perspektif pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya, membangun kelembagaan, serta menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Chambers, R. (1997). Whose reality counts? Putting the first last. Intermediate Technology Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage.

FAO. (2023). The status of women in agrifood systems. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang

JURNAL PRINSIP **VOLUME 2 No.2 2026**
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip E-ISSN 3110-603X P-ISSN 3123-3015
DOI : https://doi.org/10.36859/prinsip.v2i2.6273

Received : 14 Des 2025
Accepted : 12 Mar 2026
Published : 29 Apr 2026

Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

UN Women. (2023). Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2023.